

Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Persfektif Islam

Muhammad Istan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Email: muh.istan@gmail.com

Abstrak:

Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan sosial yang sangat kompleks dan harus segera mendapat penanganan yang tepat agar dapat segera teratasi. Indonesia sebagai negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang besar tentu tidak dapat terhindar dari masalah tersebut. Ini dibuktikan dengan jumlah penduduk miskin yang besar, mayoritas tinggal di daerah pedesaan yang sulit untuk diakses bahkan di kota besar seperti Jakarta pun juga sangat banyak ditemukan masyarakat miskin. Kemiskinan dapat diartikan dimana seseorang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dikarenakan berbagai penyebab salah satunya adalah rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh.

Kemiskinan sebagai permasalahan sosial tidak akan pernah luput dari perhatian dan pembahasan ajaran Islam. Agama Islam mengupas beberapa tema utama yang sangat urgen mengenai upaya pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan mereka. Alquran sebagai sumber utama ajaran agama Islam mengumandangkan seruan moral agar keadilan sosial dalam ekonomi ditegakkan terhadap masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan.

Upaya pengentasan kemiskinan, salah satu yang menjadi fokus utama dalam Islam adalah adanya ajaran tentang pemberdayaan ekonomi umat yang lemah. Islam memandang sumber daya manusia secara personal menjadi agen utama dalam memberdayakan ekonomi umat. Selanjutnya Islam juga melihat bahwa pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab kolektif masyarakat, sehingga upaya pemberdayaan ekonomi kaum miskin menjadi kewajiban kolektif seluruh elemen masyarakat, khususnya kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial.diperlukan sinergitas antar elemen masyarakat baik pemerintah, ulama dan masyarakat sendiri sebagai subjek dan objek perubahan.

Beberapa model pemberdayaan di atas dapat dibagi menjadi dua kelompok; langkah-langkah yang bersifat struktural dan yang bersifat kultural. Langkah struktural lebih ditekankan kepada lembaga khusus yang menanganinya agar berjalan dengan baik, sedangkan langkah kultural lebih ditekankan pada individu, baik individu yang diharapkan menjadi salah satu subjek pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan kaum fakir dan miskin maupun yang menjadi objeknya.

Kata Kunci: *Pengentasan, Kemiskinan, Pemberdayaan, Ekonomi, Umat.*

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sangat penting untuk dikurangi bahkan dihilangkan dalam kehidupan masyarakat. Apabila tidak ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mengentaskannya, maka suatu bangsa atau negara akan mengalami keterbelakangan. Keterbelakangan dalam pembangunan fisik, pembangunan sumber daya manusia serta pembangunan perekonomian akan menyebabkan negara tersebut dikuasai oleh negara-negara lain yang lebih maju.

Banyak permasalahan yang muncul akibat dilanda kemiskinan. Bahkan banyak orang yang imannya kokoh sekalipun akan rapuh jika kemiskinan sudah melanda kehidupannya. Begitu juga dalam bidang sosial sering terjadi tindakan kriminalitas seperti pencurian, perampokan, dan pemerasan, serta kejahatan lainnya. Persoalan tersebut disebabkan oleh keresahan masyarakat yang menjalani kehidupan di bawah garis kemiskinan.¹ Kemiskinan adalah kondisi kehilangan atau kekurangan terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan dasar.² Kewajiban membantu masyarakat miskin untuk lepas dari kemiskinannya adalah tugas kita semua sebagai umat Islam. Agama Islam bukan hanya mengajarkan bagaimana menjalin hubungan dengan sang Khalik (*hablum-minallah*) tetapi juga mengatur hubungan dengan sesama manusia (*hablum-minannas*).

Al-Qur'an memandang bahwa kemiskinan adalah masalah sosial yang harus diatasi. Bahkan penyakit berbahaya yang wajib diobati. Tulisan ini akan membahas model pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan kaum fakir dan miskin yang ditawarkan Al-Qur'an untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara ekonomi. Sebelum menguraikan lebih jauh tentang bagaimana Al-Qur'an memberdayakan kaum fakir dan miskin terlebih dahulu perlu dijelaskan tentang konsep pemberdayaan. Selama ini ada dua strategi yang dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan, yaitu rehabilitasi sosial dan pengembangan sosial (*social development*) atau pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*).³

¹ Mansour, Fakhri. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press, 2001, 64-75.

² Bambang Sudibyo, dkk. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media, 1995, 9.

³ Chapra, M.Umer, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000

Yang dimaksud pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) adalah “membantu klien (pihak yang diberdayakan), yakni kaum fakir dan miskin (*dhuaafa*) agar mereka memperoleh daya dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan untuk perbaikan hidup mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan daya kesejahteraan mereka. Untuk dapat membantu mereka keluar dari kubangan kemiskinan maka harus diketahui terlebih dahulu penyebab kemiskinan mereka. Kemudian baru dapat dirumuskan strategi dan program untuk membantu mereka.

Jenis Kemiskinan

Kemiskinan terjadi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kemiskinan Natural

Dalam kemiskinan natural disebutkan bahwa yang menjadi penyebab dari suatu kemiskinan adalah kondisi alam. Sesungguhnya saya agak kurang tidak sependapat adanya kemiskinan natural. Mengatakan bahwa kondisi alam menjadi salah satu penyebab kemiskinan sangat tidak tepat. Kita mengetahui bahwa negara-negara yang berada dalam kondisi ekstrim tidak berarti mengalami kemiskinan. Negara di Timur Tengah dengan kondisi alam yang sangat tandus justru makmur dengan adanya potensi minyak dan gas. Tetapi perlu diingat, negara Eropa, dengan kandungan migas yang terbatas, justru menjadi *leader* didalam teknologi eksploitasi minyak dan gas. Negara Jepang adalah negara yang rawan gempa, tetapi menjadi salah satu negara maju. Disisi lain, banyak daerah yang sebelumnya hijau dan sangat potensial perekonomiannya, tetapi kemudian menjadi gundul dan tandus serta tidak ekonomis lagi, karena salah perencanaan.

Mengatakan kemiskinan natural sebagai bagian dari penyebab kemiskinan merupakan pembenaran terhadap ketidakberdayaan atau kemalasan manusia. Didalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman,⁴ Artinya: *Dan sesungguhnya Dia-lah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan sesungguhnya Dia-lah yang mematikan dan menghidupkan. Dan sesungguhnya Dia-lah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. (QS An-Najm 53: 43-46).*

⁴ M.Said. *Tarjamah Alquran Al-Karim*. Bandung: Al-Ma-arif, cetakan pertama 1987. 476

Kemudian masih dalam Al-Qur'an Surat An Najm surat 53 ayat 48, yang menarik adalah, bahwa: *Dan sesungguhnya Dia-lah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. (Qs An Najm 53: 48.* Allah SWT tidak mengatakan bahwa kemiskinan adalah dari-Nya, karena dengan sifat kasih dan sayang-Nya telah memberikan kekayaan dan kecukupan kepada umat manusia. Apabila terjadi kemiskinan, maka manusialah penyebabnya: *Kebajikan apapun yang kamu peroleh, adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari (kesalahan) dirimu sendiri. (Qs An Nisa 4: 79).*

“Mereka (utusan-utusan) itu berkata ‘Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan. (Qs Yasin 36: 19). Dan musibah apapun yang menimpa kamu, adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu).’” (Qs Asy Sura 42: 30).

Dengan demikian, masiakah kita menyalahkan alam sebagai penyebab dari kemiskinan? Manusia direncanakan tidak untuk gagal, tetapi manusia-lah yang gagal merencanakan.

2. Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan dimana penyebabnya berasal dari dalam, budaya dia sendiri yang menyebabkan ia terbelit dalam kemiskinan. Dalam diri manusia ada sifat yang membuat ia kaya dan ada juga yang membuat ia miskin. Ada sifat *inheren* yang membuat orang itu kaya demikian juga sifat yang membuat orang itu menunjang untuk miskin. Dalam lingkup yang lebih luas, ada sifat atau karakter bangsa yang membuat bangsa itu selalu terbelit dalam kemiskinan, demikian pula ada karakter bangsa yang membuat bangsa itu cepat bangkit dari suatu kemiskinan. Kemiskinan kultural terjadi karena kita mempunyai rasa pesimis, alias penyakit si miskin. Boros, mementingkan hal yg bersifat aksesoris, keinginan pamer, tidak mempunyai harga diri, malas, menunda waktu, tidak punya kepedulian kepada yang lain adalah contoh-contoh dari pesimis.

3. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural yaitu situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung kemiskinan, tetapi sering kali

menyebabkan suburnya kemiskinan.⁵ Parsudi Suparlan menjelaskan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam komunitas masyarakat yang bersangkutan.⁶

Semua rasanya sepakat, kalo petani dan nelayan adalah orang-orang yang sangat rajin. Setiap hari mereka membanting tulang pergi ke sawah, menanam, menjaga tanaman dari hama, menyiramnya dan menuainya pada saat panen. Mereka adalah orang-orang yang rajin dan pekerja keras. Sifat itu adalah sifat orang 'kaya' semestinya, tetapi kenapa mereka tetap saja miskin? Kemiskinan yang terjadi pada mereka adalah kemiskinan struktural. Petani dan nelayan di Indonesia bukanlah pekerjaan yang membuat bangga, kehidupan mereka selalu tertindas. Pada saat musim panen, harga hasil pertanian mereka turun drastis, sedangkan pada musim paceklik, justru mereka sendiri tidak dapat menikmati harga komoditi pertanian yang tinggi.

Anehnya, lain di Indonesia, dinegara maju, petani dapat hidup mewah dan juga dipandang sebagai pekerjaan yang dapat juga menghasilkan lebih. Pertanian sudah menjadi suatu industri dengan peralatan pertanian yang modern. Mulai dari membajak sawah, mereka memakai traktor besar, bukan dengan sapi yang sudah ada sejak jaman Mesir kuno, kemudian menyiram tanaman dengan *sprinkler* yang otomatis menyiram pada saat tertentu. Belum lagi penanganan terhadap hama yang ditangani secara ilmiah dan bersifat lebih prediktif. Dan pada waktu memanenpun, tenaga manusia terasa sangat mahal hanya untuk sekedar memanen, karena semuanya sudah digantikan dengan mesin.

Indonesia adalah negara maritim dengan garis pantai terpanjang di seluruh dunia. Tetapi petani garam bukan mata pencaharian yang dapat meningkatkan harkat dan derajat kehidupannya. Lucunya lagi, Indonesia yang merupakan negara tropis dengan paparan sinar matahari yang cukup malah meng-*impor* kebutuhan garam dari Australia yang notabene adalah negara sub tropis dengan paparan cahaya sinar matahari yang lebih minim dari Indonesia.

⁵ Awan Setya Dewanta, dkk. *Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media, 1995), 31-32

⁶ Parsudi Suparlan. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 349

Serajin apapun petani garam di Indonesia, secara struktural ia termarginalkan, dan tidak bisa mengangkat derajat hidup keluarganya dari kemiskinan.

Itulah contoh dari kemiskinan struktural. Kemiskinan yang terjadi karena strukturnya yang tidak memungkinkan ia untuk berkembang. Kemiskinan yang terjadi karena faktor luar yang lebih luas. Meskipun ia mempunyai sifat-sifat yang semestinya membuat ia kaya, tetapi karena strukturnya atau faktor luar yang tidak mendukung, ia tetap akan terbelit dalam kemiskinan.

Untuk penanganan masalah kemiskinan struktural ini, pemerintah harus lebih berperan aktif. Pemerintah harus berpikiran dan mempunyai sifat seperti seorang kaya. Pemerintah harus mempunyai pemikiran jauh kedepan, mempunyai *planning* dan ‘mimpi’ akhir dari suatu perjalanan bangsa ini, sehingga semua daya dan upaya diarahkan untuk mencapai mimpi tersebut.

Beberapa contoh dibawah ini menunjukkan peranan pemerintah yang seharusnya dilakukan. Fadel Muhammad adalah seorang pengusaha yang pernah menjadi Gubernur yang sukses di Gorontalo. Pada saat kepemimpinannya, ia melihat bahwa Gorontalo mempunyai potensi pertanian jagung. Permintaan jagung dunia sangat besar, terutama Jepang, dimana jagung dijadikan bahan mentah untuk pembuatan minyak. Sejak beliau menjadi Gubernur, ia menggalakkan gerakan menanam jagung. Ia berjanji kepada masyarakat agar tidak memusingkan masalah pemasaran, karena ia menjamin semuanya akan terserap dengan harga minimal yang telah ditetapkan. Pemda-lah yang kemudian giat mencari pemasaran keluar negeri. Sebuah sinergi yang sangat baik. Petani yang mempunyai sifat rajin dan hanya tahu bertani saja tetapi tidak mengerti mengenai masalah pemasaran. Sedangkan pemerintahnya bersifat proaktif, mempunyai kemauan yang kuat, dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Semuanya kemudian jadi terangkat derajat hidupnya, kemiskinan hanya tinggal cerita. Pemerintah telah memutuskan penghalang seseorang untuk menjadi kaya, kemiskinan struktural berkurang drastis, dan apabila tetap masih ada aja orang yang miskin, hanyalah kemiskinan kultural yang ada.

Pada jaman penjajahan Belanda dengan VOC-nya dulu, ada istilah tanam paksa. Rakyat Indonesia dipaksa menanam jenis tanaman tertentu oleh pemerintah Belanda, semuanya kemudian dikuras untuk diperjualbelikan di pasaran dunia. Rakyat tidak memusingkan lagi jenis tanaman apa yang harus ditanam, karena VOC telah mengatur semuanya. VOC mempunyai

kemampuan *forecasting* jenis tanaman apa yang laku dipasaran, dan juga ditunjang dengan penelitian ilmiah, kira-kira jenis tanaman apa yang cocok ditanam pada suatu daerah. Pada waktu tersebut, Indonesia terkenal sebagai penghasil karet, gula, kopra, cengkeh, coklat dan tanaman lainnya di seluruh dunia. Rakyat Indonesia tahunya hanya menanam dan untuk pemasaran, Belanda yang mengatur semuanya. Belanda sangat kaya karenanya, banyak gedung-gedung yang dibangun di Belanda karena pengolahan kekayaan bangsa Indonesia itu.

Sayangnya adalah, karena pada waktu itu kita adalah bangsa terjajah, upah dan hasil tanaman dibeli dengan harga yang sangat tidak layak. Artinya, secara struktural karena kita adalah bangsa yang terjajah, yang dipaksa untuk menerima harga yang ditetapkan oleh si penjajah, maka kemiskinan tetap ada. Seharusnya pemerintah sekarang meniru apa yang telah dilakukan pada waktu penjajahan Belanda dulu, tetapi dengan penetapan harga yang wajar.

Pemerintah dengan kebijakannya, harus merubuhkan semua benteng penghalang yang membuat potensi untuk menjadi kaya dari rakyatnya menjadi tersumbat. Semoga Indonesia yang alamnya telah kaya tetapi belum mampu mengayak penduduknya akan segera keluar dari lingkaran kemiskinan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan

1. Pengangguran

Semakin banyak pengangguran, semakin banyak pula orang-orang miskin yang ada disekitar. Karena pengangguran atau orang yang menganggur tidak bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal kebutuhan setiap manusia itu semakin hari semakin bertambah. Selain itu pengangguran juga menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat, yaitu pengangguran dapat menjadikan orang biasa menjadi pencuri, perampok, dan pengemis yang akan meresahkan masyarakat sekitar.

2. Tingkat pendidikan yang rendah

Tidak adanya keterampilan, ilmu pengetahuan, dan wawasan yang lebih, masyarakat tidak akan mampu memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik. Karena dengan pendidikan masyarakat bisa mengerti dan memahami bagaimana cara untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Dengan belajar, orang yang semula tidak bisa menjadi bisa, salah menjadi benar, dsb.

Maka dengan tingkat pendidikan yang rendah masyarakat akan dekat dengan kemiskinan.

Rendahnya tingkat pendidikan menggiring masyarakat pada kebodohan. “Bodoh” disini bukan berarti secara harfiah dimana jika mereka bersekolah, lalu mereka akan mendapatkan nilai yang jelek. Bukan seperti itu. Namun lebih kepada tidak adanya atau tidak tersedianya akses menuju pendidikan yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Misalnya saja, para nelayan mungkin tidak terlalu memerlukan pelajaran fisika, namun pengetahuan mengenai ragam dari hasil laut dapat mendukung mereka di dalam mengoptimalkan pekerjaan.

3. Bencana Alam

Banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan tsunami menyebabkan gagalnya panen parapetani, sehingga tidak ada bahan makanan untuk dikonsumsi dan dijual kepada penadah atau koperasi. Kesulitan bahan makanan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi.

4. Mental aparatur pemerintah dan masyarakat

Secara garis besar, korupsi penyebab utama dari kemiskinan di Indonesia yang sulit untuk dihilangkan. Selama ada pejabat pemerintahan mulai dari tingkat yang paling rendah sampai dengan tingkat pusat yang hanya berpikir untuk memperkaya dirinya saja, maka itu akan membuat Indonesia selalu ada orang-orang yang miskin. Yang menyedihkan lagi bahwa penyebab dari kemiskinan yang satu ini tidak hanya terfokus pada nominal angka yang dikorupsi. Ada seorang pejabat yang mungkin mencuri 100 juta dari anggaran pendidikan yang ada, sebenarnya ia telah mengambil 400 juta, bahkan lebih banyak lagi. Kenapa bisa begitu? Karena dengan 100 juta itu dapat memperbaiki kehidupan 100 pelajar misalnya saja, dan dari 100 pelajar tersebut dapat mengembalikan manfaatnya kepada lingkungan di sekitarnya. Hilangnya uang 100 juta tersebut telah memberikan dampak yang sangat mendalam serta meluas pada kemiskinan masyarakat.⁷

Faktor yang satu ini merupakan salah satu hal terpenting yang perlu untuk kamu tahu, bahwa fakta yang ada di lapangan menyebutkan jika santunan belum tentu sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah kemiskinan. Ketika

⁷ <https://www.satujam.com/faktor-penyebab-kemiskinan/>, akses tanggal 12 Mei 2017, pkl.19.10

orang-orang miskin ‘terbiasa’ dengan adanya pemberian donasi, maka akan sulit dari mereka untuk mandiri secara finansial. Karena mental mereka adalah mental “menerima”, sedangkan solusi untuk kemiskinan adalah pekerjaan serta pendidikan.

Kriteria Kemiskinan

Di Indonesia, penentuan kriteria kemiskinan tidak pernah disepakati oleh para pakar ekonomi, seperti yang disampaikan oleh M. Dawam Raharjo sebagai berikut: Kriteria kemiskinan *pertama* Sajogyo menetapkan bila angka pendapatan atau pengeluaran yang setar dengan 240 kg beras untuk wilayah pedesaan dan 480 kg beras untuk wilayah perkotaan atau kriteria rata-rata 360 kg beras.⁸ *Kedua*, kriteria yang disampaikan oleh Hendra Esmarayaitu mengukur garis kemiskinan dengan tingkat pengeluaran rata-rata dalam rupiah dan harga yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti beras, gula, daging, sayur-sayuran, buah-buahan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.⁹ *Ketiga*, kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengukur kemiskinan dengan tingkat pengeluaran setara 2.100 kalori perkapita perhari plus pengeluaran non pangan seperti sewa rumah, biaya sekolah, kesehatan, transportasi, dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok.

Para pemikir ekonomi Islam juga mencurahkan perhatian yang cukup besar, karena Islam memberikan perhatian bagi kaum miskin, masalah kemiskinan ini dipandang memiliki potensi menjadi faktor penyebab terganggunya tatanan sosial.¹⁰ Timbulnya berbagai konflik di berbagai wilayah di dunia termasuk di Indonesia saat ini salah satu penyebabnya adalah kemiskinan atau tidak meratanya distribusi kekayaan. Para ahli ekonomi Islam memberikan standar garis kemiskinan dalam kerangka ekonomi Islam. Penentuan standar ini menjadi sangat penting, karena di dalam Islam terdapat kewajiban terkait dengan harta, yaitu kewajiban mengeluarkan zakat harta (maal) ini. dengan indikator yang jelas ini dapat diketahui siapa yang berdaya secara ekonomi dan kepadanya diwajibkan mengeluarkan zakat, dan siapa yang tidak berdaya secara ekonomi (baca: miskin) maka orang tersebut berhak menerima zakat.

⁸ Rahardjo, M. Dawam. *Islam dan Transformasi Sosial Ekono-bomi*. Jakarta: LSAF

⁹ Hendra Esmara. *Teori Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Kumpulan Esei untuk Menghormati Sumitro Djojoadikusumo*. Jakarta: PT Gramedia. 1987, 78

¹⁰ Qardawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam. Terjemahan. Zainal Arifin dan Dablia Dablan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995, 24-29

Menariknya, Islam mengaitkan standar garis kemiskinan dilihat dari aspek harta yaitu dengan nisab yang menjadi ketentuan zakat. Nisab yang menjadi acuan rumusan di sini adalah nisab wajib zakat emas. Dalam zakat terdapat ketentuan bahwa suatu pendapatan atau kekayaan wajib dikeluarkan zakatnya apabila dalam setahun sudah memenuhi nisabnya. Nisab untuk zakat harta (maal) adalah pendapatan atau kekayaan yang setara dengan 89 gram emas setahun. Misalkan harga emas 24 karat sekarang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gram, maka kekayaan yang senilai dengan 89 gram x Rp. 500.000,- = Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Angka inilah garis batas dalam kriteria pendapatan antara yang miskin dan berhak menerima zakat dan yang cukup dan wajib mengeluarkan zakat harta (maal). Besarnya zakat harta (maal) adalah sebesar 2,5% dari total kekayaan. Berdasarkan contoh tersebut diatas maka zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp. 1.112.500 (satu juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) pertahun. Jika pendapatan atau gaji kita sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan, maka zakatnya sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan.¹¹ Harta zakat konsep penentuan garis kemiskinan seperti tersebut diatas.

Sementara itu Islam memandang tata kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan itu menjadi sasaran utama diturunkannya agama ini di muka bumi. Sehingga sangat wajar hukum Islam sangat memberikan perhatian terhadap kemiskinan.

Salah satu bentuk ketidakberdayaan sosial adalah masyarakat adalah kemiskinan. Problem ini bukanlah masalah baru yang dihadapi oleh masyarakat kita. Gambaran kemiskinan ini merupakan penampakan yang biasa ditemukan dalam struktur kehidupan masyarakat di sekitar kita. Keberadaan orang miskin (*the haven't*) di sekitar orang kaya (*the have*) merupakan sunnatullah yang selalu ada di setiap masa kehidupan.

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak dalam mengentaskan kemiskinan untuk mengeluarkan masyarakat dari kubangan kemiskinan, baik sektor formal maupun non formal. Sektor formal seperti yang dilakukan oleh pemerintah, dengan berbagai program pro rakyat miskin. Sektor

¹¹ Raharjo, M. Dawam. Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi. Jakarta: LSAF. 446

non formal seperti yang dilakukan oleh komunitas masyarakat yang peduli dengan rakyat miskin atau kegiatan lain yang sejenisnya.

Pengentasan kemiskinan memang dirasakan sulit karena banyaknya dan beragamnya faktor yang ikut menyuburkan kemiskinan. Salah satu kesulitan utama dalam mengentaskan kemiskinan adalah indikator atau kriteria yang layak digunakan untuk menentukan garis kemiskinan, sehingga seseorang dikategorikan miskin atau tidak miskin.¹² Dengan kriteria yang jelas maka upaya peningkatan kesejahteraan kaum miskin dapat mencapai sasaran yang sesungguhnya.

Kemudian masalah kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari faktor penyebabnya. Faktor penyebab kemiskinan terbagi dua aspek, yaitu aspek internal maupun eksternal. Secara teoritis kemiskinan digolongkan kedalam tiga kelompok besar, yaitu kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Maka dengan ini fokus tulisan ini bagaimana pemberdayaan ekonomi umat dalam mengentaskan kemiskinan menurut perspektif Islam.

Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan ekonomi umat pada dasarnya adalah suatu upaya mengoptimalkan dan meningkatkan kemampuan orang per orang, kelompok dan masyarakat dalam suatu lingkungan tertentu agar memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri, utamanya dalam masalah ekonominya. Ekonomi umat dalam hal ini adalah juga ekonomi rakyat, karena hakekat keduanya adalah sama. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Sistem ekonomi kerakyatan mencakup administrasi pembangunan nasional mulai dari sistem perencanaan hingga pemantauan dan pelaporan. Sesungguhnya ekonomi kerakyatan adalah demokrasi ekonomi. Di Indonesia demokrasi ekonomi dikembangkan beradaskan UUD 1945 dan Pancasila.

Zaman sekarang masih ada anggapan bahwa Islam merupakan hambatan bagi kemajuan zaman (modernisasi). Max Weber menganggap Islam sebagai agama 'kelas prajurit', mempunyai kecenderungan pada 'kepentingan feodal', berorientasi pada 'prestise sosial', bersifat 'sultanistik', dan bersifat 'patrimonial

¹² Baswir, Revrison. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 17.

birokratis, serta tidak mempunyai ‘prasyarat rohaniah bagi (pertumbuhan) kapitalisme.¹³ Weber percaya bahwa ajaran Islam mempunyai sikap anti akal dan sangat menentang pengetahuan, terutama pengetahuan teologis. Dalam Islam tidak ditemukan adanya ajaran yang mengandung spirit mendorong terhadap kemajuan ekonomi.¹⁴ Agak berbeda dengan ajaran kristen protestan yang menjadi spirit lahirnya sistem ekonomi kapitalisme dalam masyarakat barat yang moderen.

Pendapat tersebut muncul karena kesalahan dalam memahami ajaran Islam. Agama Islam adalah agama yang komprehensif dan universal. Dalam hal pemberdayaan kaum yang lemah, sejak 15 abad yang lalu (zaman hijriah) Islam telah membahas dengan jelas dan tegas tentang perlunya mengentaskan orang-orang yang berada dalam kubangan kemiskinan. Dalam konteks ini Islam memiliki perhatian terhadap mereka yang secara sosial dan ekonomi, serta pendidikan tidak berdaya. Mereka adalah para anak yatim, piatu, yaitim piatu, orang fakir, orang miskin, budak, orang cacat, orang tua yang jompo, orang yang tidak mampu membayar hutangnya dan para musafir yang kehabisan bekalnya dalam perjalanan.

Secara praktis, ajaran Islam menuntut umatnya untuk selalu berupaya melakukan pemberdayaan dalam kehidupannya, sehingga terlepas dari berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kebodohan, penyakit, dan kebatilan.¹⁵ Masalah kemiskinan merupakan suatu lingkaran utuh, yaitu sebuah sistem yang saling berhubungan satu sama lainnya. Artinya satu masalah memiliki potensi untuk menghasilkan masalah lain yang lebih besar dan dahsyat dampaknya.¹⁶ Kemiskinan akan melahirkan keterbelakangan pendidikan (baca: kebodohan), kriminalitas, dan masalah sosial lainnya. Sebagaimana ungkapan yang akrab di telinga kita bahwa kemiskinan mendorong kita kepada kekafiran, maka kita harus bersama-sama menghilangkan kemiskinan dalam kehidupan saudara-

¹³ <https://saripuddin.wordpress.com/pemikiran-max-weber/>, akses tanggal 15 Mei 2017, pkl. 19.35

¹⁴ Max Weber, *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, (Surabaya : Pustaka Prometheus, 2000),.

¹⁵ Zadjuli, Imam Suroso. *Visi Perekonomian Indonesia Menyongsong Milenium III*. Makalah Seminar. 1999, 15.

¹⁶ M. Nastagin, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam, Dana Bhakti Wakaf*, (Yogyakarta. 2006), 68.

saudara kita dan menyelamatkan saudara kita dari jurang kemiskinan agar terhindar dari kekafiran.

Agama Islam memiliki sumber pokok dalam pemberdayaan ekonomi umat ini adalah Alquran dan Hadis. Al-Qur'an yang merupakan firman Allah swt, banyak memberikan perhatian terhadap orang-orang miskin baik secara sosial dan ekonomi dalam struktur kehidupan masyarakat.

Dalam pengentasan kemiskinan ini diperlukan juga motivasi dan etos kerja personal untuk berusaha agar terlepas dari kemiskinan. Secara personal, manusia harus menyadari bahwa untuk bisa lepas dari kemiskinan itu adalah dirinya sendiri, sebab sebagus apapun program dan berapapun besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk pengentasan kemiskinan, kalau manusianya enggan atau tidak memiliki kemauan untuk lepas dari kemiskinan maka tidak akan pernah lepas. Karena Allah swt tidak akan merubah keadaan suatu kaum (seseorang) kalau seseorang itu tidak mau merubahnya sendiri.

Pengentasan kemiskinan juga dibutuhkan sinergitas peran antara pemerintah, dan masyarakat. Pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan hanya dengan ego sektoral, tetapi harus komprehensif dari berbagai unsur yaitu pemerintah, peran lembaga terkait dan masyarakat sendiri sebagai subjek dan objek perubahan. Pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Dalam kerangka pembangunan nasional, upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang, penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang; peningkatan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana, baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah, perlindungan melalui pemihakan kepada yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.¹⁷

Prinsip Pemberdayaan Ekonomi Umat

Al-Qur'an memandang bahwa kemiskinan adalah masalah sosial yang harus diatasi. Bahkan penyakit berbahaya yang wajib diobati. Islam tidak mendukung teori perilaku individu yang memandang bahwa yang

¹⁷ Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 255.

bertanggungjawab atas kemiskinan adalah orang miskin sendiri, bukan masyarakat, pemerintah atau orang kaya. Tetapi Islam juga tidak sependapat dengan teori struktural yang hanya memfokuskan pada penyebab struktural terhadap masalah kemiskinan.¹⁸

Di satu sisi, Islam mengakui dan melindungi kepemilikan individu yang sah. Setiap orang yang memperoleh harta secara sah, dia berkuasa penuh atas harta tersebut. Islam mengakui perbedaan dalam mendapatkan harta dan memandangnya sebagai sesuatu yang wajar sesuai dengan perbedaan keahlian dan kemampuan setiap orang serta sebagai pendorong seseorang agar bekerja dan berusaha secara sungguh-sungguh. Hanya saja perbedaan tersebut harus dalam konteks perbedaan yang terkendali dan berkeadilan. Perbedaan yang mendorong semangat kerja dan produktivitas, melahirkan keharmonisan dan saling melengkapi, bukan kontradiksi dan konflik.

Di sisi lain, Islam menuntut adanya distribusi kekayaan yang dapat menjamin standar kehidupan yang layak bagi setiap orang. Islam berpendapat bahwa problem ekonomi terletak pada praktik ketidakadilan manusia dalam distribusi kekayaan, bukan pada menipisnya kekayaan alam dibanding dengan kebutuhan manusia.¹⁹

Dari sini tampak bahwa persoalan bagaimana membebaskan kaum fakir dan miskin dari kemiskinan dan bagaimana memberdayakan kehidupan ekonomi mereka berkaitan erat dengan masalah pemanfaatan dan pendistribusian harta. Karena itu, upaya pembebasan dan pembedayaan fakir dan miskin terlebih dahulu harus melihat bagaimana ketentuan Al-Qur'an menyangkut pemanfaatan dan distribusi harta.

Dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang harta (*māl, amwāl*),²⁰ secara garis besar dapat diambil dua ketentuan Al-Qur'an menyangkut pemanfaatan dan distribusi harta. Yang pertama berupa perintah dan anjuran dan yang kedua berupa larangan. Dari dua ketentuan ini, ada beberapa langkah yang ditempuh Al-Qur'an dalam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan

¹⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Musykilat al-Faqr wa Kaifa „Alajahā al-Islām*, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1985, 33-34.

¹⁹ Abad Badruzaman, *Teologi Kaum Tertindas (Kajian Tematik Ayat-ayat Mustadh'afin dengan Pendekatan Keindonesiaan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, 137.

²⁰ Abad Badruzaman, *Teologi Kaum Tertindas ...*, 139-144

kaum fakir dan miskin, yaitu perintah bekerja, perintah memberi makan, perintah berinfak, perintah mengeluarkan zakat, pembagian ganimah dan fa'i, penetapan hukum waris, larangan riba, larangan monopoli (*ih̥tikār*) dan menimbun harta (*iktināz*).

Perintah bekerja ini terkait dengan kedudukan dan tujuan kehadiran manusia di bumi ini yang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah. Sebagai hamba Allah (abdullah) manusia bertugas untuk mengabdikan (beribadah kepada Allah) (QS. al-Dzariyat [51]:56). Mengabdikan (beribadah) kepada Allah dapat dilakukan manusia melalui dua bentuk ibadah: ibadah khusus (ibadah mahdhah) dan ibadah umum (ibadah ghair mahdhah). Ibadah khusus adalah segala bentuk ibadah yang aturan dan tata caranya sudah ditentukan oleh Allah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Sedangkan ibadah umum adalah segala bentuk amal saleh yang aturan dan tata caranya tidak ditentukan secara khusus oleh agama. Semua aktifitas dan kegiatan manusia dalam bidang apa pun, termasuk bekerja, sejatinya dilakukan dalam rangka pengabdian dan ibadah kepadaNya (QS. Al-An'am [6]:162).

Sebagai khalifah Allah di bumi (QS. al-Baqarah [2]:30) manusia menjadikannya wakil Allah dan kekuasaan-Nya untuk mengurus bumi dengan segala isinya dan memakmurkannya (QS. Hud [11]:61). Memakmurkan bumi artinya mensejahterakan kehidupan di dunia ini. Untuk itu, manusia wajib bekerja dan berusaha, beramal saleh (berbuat baik yang bermanfaat) bagi dirinya, masyarakat dan lingkungan hidupnya serta menjaga keseimbangan alam dan bumi yang dihuninya, sesuai dengan tuntunan yang diberikan Allah melalui agama.

Ayat-ayat Al-Qur'an dalam surat (QS. Al-Maun [107]:3) yang membahas kemiskinan mendorong kaum Muslimin agar menjadi umat yang peduli dan berbagi dengan kaum dhuafa, termasuk kaum miskin, dengan memberi pertolongan pertama kepada mereka dalam bentuk perintah memberikan makanan pokok kepada orang miskin guna menjaga kelangsungan hidup mereka.²¹

Pearse dan Stiefel menyatakan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, primer dan sekunder. Kecenderungan

²¹ M.Said. *Tarjamah Alquran Al-Karim*. Bandung: Al-Ma-arif, cetakan pertama 1987. 541.

primernya, proses pemberdayaan menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan sekundernya melihat pemberdayaan sebagai proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya.²²

Konsep pemberdayaan merupakan hasil dari proses interaktif di tingkat ideologis dan praktis. Pada tingkat ideologis, merupakan hasil interaksi antara konsep *top-down* dan *bottom-up* antara *growth strategy* dan *people centered strategy*.²³

Sedangkan di tingkat praktis, proses interaktif terjadi melalui pertarungan antar otonomi. Oleh karena itu konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*).²⁴ Kaum fakir dan miskin merupakan masalah sosial yang kompleks serta multidimensi. Menghadapi persoalan sosial yang akut dan kronis ini, Al-Qur'an menawarkan beberapa prinsip dalam pemberdayaan umat fakir dan miskin ini sebagai berikut:

Pertama, prinsip *ta'awun*, yakni prinsip kerjasama dan sinergi di antara berbagai pihak, yakni pemerintah, lembaga zakat, ulama, organisasi Islam dan berbagai kelompok masyarakat secara umum. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah Swt sebagai berikut:

“Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. al-Mā'idah [5]:2)

Penanggulangan kemiskinan bukan monopoli pemerintah dengan berbagai departemen sektoralnya. Namun penanggulangan tersebut merupakan permasalahan multidimensi yang menjadi tanggungjawab seluruh pihak-pihak

²² Ony S. Prijono dan A. M. W. Pranarka, *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: Center for Strategic and International Studies, 1996, 56-57.

²³ Kartasasmita, Ginanjar. *Kebijaksanaan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan*, Malang. Unibraw Fakultas Ilmu Administrasi, 1993.

²⁴ Kartasasmita, Ginanjar. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta. PT. Pustaka Cidesindo, 1996

terkait. Dengan berbagai keterbatasan, baik aspek manajemen, organisasi maupun keuangan, pemerintah tidak akan mampu menjadi pemain tunggal dalam pengentasan kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara menyeluruh lintas sektoral dan regional, dengan melibatkan forum lintas pelaku. Karena itu kerjasama dan sinergi dalam pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan umat mutlak harus dilakukan. Bentuk *ta'awun* ini meliputi kelembagaan, manajemen, finansial, sumber daya manusia, program, metodologi, dan kebijakan sehingga melahirkan kekuatan terpadu dalam mengatasi kemiskinan.

Kedua, prinsip *syura*, yakni prinsip musyawarah di antara pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan persoalan pemberdayaan kaum fakir dan miskin dalam satu program kepedulian terhadap masalah kemiskinan dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang menyebabkan kemiskinan serta merumuskan langkah-langkah penanggulangan yang berkesinambungan. Prinsip *syura* ini terutama terkait dengan cara-cara mengenali masalah dengan tepat, menemukan data yang akurat, melahirkan langkah yang cepat. Sebab penanggulangan kemiskinan tanpa social capital di atas akan rapuh jika dilakukan tanpa berpegang pada prinsip *syura*. Sebab prinsip *syura* ini berarti pengakuan dan penghargaan atas eksistensi pemikiran, ide, kehendak, pengalaman dari setiap komponen dalam komunitas. Dengan mekanisme *syura* berarti memperluas tingkat keterlibatan dan partisipasi setiap komponen masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan kaum fakir dan miskin.

Penutup

Masalah kemiskinan adalah persoalan klasik yang tetap sulit dicarikan solusinya, terlebih lagi untuk waktu yang instan. Kemudian dengan adanya standar ganda juga sulit merumuskan kebijakan yang sesuai untuk pengentasan kemiskinan ini. Faktor penyebab kemiskinan juga menjadi penyebab sulitnya mengentaskan kemiskinan ini karena ada tiga kelompok kemiskinan, yaitu kemiskinan natural yaitu disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Kemudian kemiskinan kultural kemiskinan yang disebabkan oleh gaya hidup, budaya, dan kebiasaan. Serta kemiskinan struktural yaitu disebabkan oleh faktor sosial dan sistem politik suatu negara. Penyebab kemiskinan yang terakhir ini sangat sulit dicarikan solusinya karena berhubungan dengan sistem politik dan kebijakan negara.

Ajaran agama Islam menetapkan peran personal manusia untuk selalu berusaha dan bekerja keras untuk meningkatkan penghasilan dengan tetap berpegang teguh pada ajaran Islam dalam artian bukan menghalalkan segala cara agar terlepas dari kemiskinan yang membelenggu mereka. Islam mengajarkan bahwa bekerja adalah sesuatu yang harus dilakukan, bukan dengan memintaminta atau mengemis kepada pihak lain. Karena mencari dan memberi lebih baik dari menerima (tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah).

Kemudian untuk mengurangi kemiskinan yang diakibatkan oleh struktur sosial, ajaran Islam menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia itu membutuhkan manusia yang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri, bukankah nenek moyang kita nabi Adam As, hidup sendiri dengan semua fasilitas lengkap dari Allah swt di surga, tetapi beliau juga tidak dapat hidup sendiri, apa lagi kita dengan keterbatasan yang kita miliki. Sikap ini ditunjukkan oleh kewajiban mengeluarkan zakat bagi orang yang mampu, sebagai upaya pemerataan ekonomi secara adil. ■

Daftar Pustaka

- Abad Badruzaman. 2007. *Teologi Kaum Tertindas (Kajian Tematik Ayat-ayat Mustadh"afin dengan Pendekatan Keindonesiaan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Awan Setya Dewanta, dkk. *Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media, 1995
- Bambang Sudibyo, dkk. 1995. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media
- Baswir, Revrison. 1997. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hendra, Esmara. 1987. *Teori Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Kumpulan Esei untuk Menghormati Sumitro Djojoadikusumo*. Jakarta: PT Gramedia.
- Chapra, M.Umer. 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi, terj. Ikhwan Abidin*, Jakarta: Gema Insani Press
- Kartasasmita, Ginanjar. 1993. *Kebijakan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan*, Malang. Unibraw Fakultas Ilmu Administrasi
- 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta. PT. Pustaka Cidesindo

- Mansour, Fakhri. 2001. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press,
- M.Said. 1987. *Tarjamah Alquran Al-Karim*. Bandung: Al-Ma-Arif, Cetakan Pertama.
- Max Weber. 2000. *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, Surabaya : Pustaka Prometheus
- M. Nastagin, 2006. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam, Dana Bhakti Wakaf*, Yogyakarta
- Ony S. Prijono dan A. M. W. Pranarka. 1996. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: Center for Strategic and International Studies
- Parsudi Suparlan. 2002. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Rahardjo, M. Dawam. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: LSAF
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Qardawi, Yusuf. 1995. *Norma dan Etika Ekonomi Islam. Terjemahan. Zainal Arifin dan Dablia Dablan*. Jakarta: Gema Insani Press
- 1985. *Musykilat al-Faqr wa Kaifa „Alajabā al-Islām*, Beirut: Mu“assasah al-Risālah
- Zadjuli, Imam Suroso. 1999. *Visi Perekonomian Indonesia Menyongsong Milenium III*. Makalah Seminar
- <https://saripuddin.wordpress.com/pemikiran-max-weber/>, akses tanggal 15 Mei 2017, pkl. 19.35
- <https://www.satujam.com/faktor-penyebab-kemiskinan/>, akses tanggal 12 Mei 2017, pkl. 19.10